

BAB V

PENUTUP

5.1 MATA RANTAI POLITIK PEREMPUAN

Politik, sebuah wahana yang sangat panas bahkan sampai membuat orang bunuh diri. Politik merupakan bahasan tanpa kesudahan dan selalu bergulir tanpa henti, politik telah menyelimuti hidup kita. Politik berada "disini", "disana", bahkan "dimana-mana", hadir mengemuka disegala sudut lingkup hidup kita. Politik menyertakan subjek didalamnya, yakni manusia, sesuai dengan konsep zoon politikon Aristoteles. Akan tetapi, sejak pertama kali politik hadir di zaman Yunani, politik telah meminggirkan keberadaan perempuan. Sehingga kemudian muncul logika berpikir yang tertanam dengan sangat subur bahwa politik diciptakan oleh laki-laki dan untuk digunakan (kembali) oleh laki-laki, sementara perempuan hanyalah bagian pinggir dan digunakan sebagai alat untuk dikuasai oleh laki-laki.

Politik dengan arah yang meminggirkan perempuan dalam keberadaannya tidak lagi menuju pada suatu usaha untuk mencapai tatanan hidup yang adil, melainkan menjadi sebuah sistem dengan azas patriarkal. Budaya patriarkal sendiri merupakan granat sekaligus racun mematikan bagi kaum perempuan, ironisnya budaya ini telah sangat melembaga dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lamanya. Budaya patriarkal berusaha menunjukkan kegagahannya dengan semakin menekan, menindas dan memperkosa hak-hak perempuan sebagai manusia. Budaya ini hidup dengan kuat dan subur dalam segala aspek kehidupan. Kaum feminis berusaha membongkar budaya patriarkal dengan berbagai cara dan mereka dengan gigih memperjuangkan hak-hak perempuan serta identitas "kedirian" perempuan yang selama ini telah dikuasai oleh patriarkis.

Kaum feminis menyerang patriarkal dari berbagai arah seperti melalui: aksi tindakan nyata, pembongkaran persoalan ketubuhan perempuan bahkan melalui pembongkaran teks dan bahasa (dimana bahasa yang ada selama ini

merupakan bahasa maskulin, sehingga diperlukan bahasa dan gaya tulis yang feminis untuk mensejajarkan perempuan dihadapan laki-laki). Usaha penyerangan dari berbagai arah tersebut memang merupakan sebuah kemajuan pesat namun arah penyerangan tersebut kurang tepat sasaran, arah utama yang harusnya dituju oleh kaum feminis adalah penyerangan terhadap politik. Politik merupakan kunci utama untuk membongkar budaya patriarkal yang sangat melembaga, hal ini dikarenakan dalam politik terdapat kekuasaan yang dapat menghasilkan kebijakan maupun regulasi. Jika ingin membongkar budaya patriarkal maka yang perlu dibongkar pertama-tama adalah politik yang telah bersemayam di dalamnya, mengutip Badiou bahwa suatu perjuangan perubahan adalah "*a struggle of universalism against universalism, not of particularism against universalism*".³⁰ Membongkar budaya patriarkal tidak cukup dengan menembus pada segi ketubuhan seksual perempuan maupun tekstual semata, hal ini ibarat panah yang kurang tepat sasaran, yang diperlukan adalah suatu kumparan universal melawan universal dan itulah politik.

Kaum feminis gelombang awal lebih mendekati politik dengan seksualitas, sementara feminis posmodern lebih mendekati term politik dengan pembongkaran tulisan maupun bahasa, namun pendekatan tersebut telah menyempitkan politik itu sendiri. Politik mengandung percepatan tanpa batas ruang, politik melampaui masalah seksualitas maupun problema bahasa pada perempuan, politik telah meliliti "kedirian" setiap subjek individu sehingga ruang gerak politik begitu luas. Cakupan politik memang sangat luas namun rasanya tidak akan lepas dari konsep zoon politikon, zoon politikon mengisyaratkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpolitik, kata manusia disini tentunya tidak hanya mengacu kepada laki-laki saja tetapi juga perempuan. Permasalahannya kembali bahwa politik selalu diidentikkan dengan *man* (laki-laki) dan bukan *human* (laki-laki dan perempuan), oleh karena itu gagasan akan politik biseksual menjadi suatu hal penting dan baru serta jauh lebih terarah kepada telos keadilan. Politik biseksual menyertakan di dalamnya subjek politik, yakni laki-laki dan perempuan, meski begitu kata biseksual disini tidak diartikan

³⁰ Takwin, *op. cit.*, hal. xix

sebagai jenis kelamin, biseksual disini merupakan *beyond of gender*, melampaui jenis kelamin, sesuatu yang lebih esensial dari subjek politik.

Politik bekerja pada berbagai bentuk sistem pemerintahan yang diadopsi dengan berbeda pada setiap negara, meski begitu sistem pemerintahan politik yang sangat populer dipercaya adalah demokrasi. Bentuk pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan yang sangat ideal dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain, *democracy is the best of the worse*. Demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat dan bagi rakyat telah berubah dalam praktiknya, dalam demokrasi sedikitnya terdapat tiga syarat pokok yang harus tersedia, yakni: (1) Kompetisi, dimana terdapat persaingan secara terbuka dan sportif kepada setiap individu; (2) Partisipasi politik, dimana setiap warga negara terlibat dalam segala kegiatan politik tanpa pandang ras, etnis, agama, kelas maupun gender dan (3) Adanya kebebasan politik dan sipil, kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Ketiga syarat tersebut harus dimiliki oleh masyarakat yang demokratis namun dalam praktik yang terjadi justru bertolak belakang dengan syarat tersebut, hal ini terlihat jelas dalam peminggiran identitas perempuan dalam politik demokrasi.

Demokrasi turut meminggirkan identitas perempuan, perempuan tidak dapat melakukan *fair competition* dalam politik hal ini dikarenakan politik berdiam dalam ruang publik sementara selama ini perempuan selalu terangkeknng dalam ruang privat, hal ini pula yang membuat perempuan sering menjadi warga negara kedua. Persoalan kewarganegaraan dalam politik modern pun ikut diseret dalam pembedaan atas dasar jenis kelamin, padahal secara jelas *sexual difference* harusnya tidak lagi menjadi suatu landasan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perempuan bisa membongkar patriarkal jika tidak dapat membongkar politik (*man*) dengan masuk ke dalamnya? Dan bagaimana juga perempuan bisa masuk ke politik jika selama ini perempuan selalu dipenjara pada ruang privat serta tugas domestik untuk mengurus suami dan anak? Hal tersebut justru akan terus menggerus perempuan untuk semakin terpinggirkan dan memiliki pemahaman pendidikan politik yang kurang padahal hal itu sangat mereka butuhkan.

Oleh karena itu, mau tidak mau perempuan harus memasukkan dirinya ke dalam ruang politik (publik) agar mereka bisa melakukan perubahan serta dapat menemukan identitas dasar mereka sebenarnya sebagai *political being* sebagaimana tersirat dalam konsep zoon politikon. Perempuan harus menemukan diri mereka sebagai subjek politik dan berbicara sebagai subjek karena selama ini perbincangan persoalan perempuan hanya terwakili oleh suara-suara laki-laki yang mengaku "tahu" akan persoalan diri perempuan dan bersuara seperti perempuan. Perempuan memiliki kepentingan yang sangat besar dalam politik dan turut membantu proses pengembalian degradasi makna politik.

Meminjam persoalan kontrak yang dirumuskan oleh Thomas Hobbes, Hobbes merumuskan bahwa kontrak antara manusia yang secara alamiah baginya memiliki kondisi menyimpang (mementingkan diri sendiri, suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam dan jahat) terjadi dikarenakan perasaan paling kuat yang dimiliki manusia, yakni perasaan takut akan kematian dan diikuti oleh keinginan untuk hidup lebih leluasa. Perasaan ini yang menurut Hobbes akan mendorong manusia dari keadaan yang tidak menentu menuju perdamaian dimana manusia sampai pada tahap persetujuan bersama dan perang pada akhirnya menjadi ancaman bagi kepemilikan materi individu.

Hobbes menyebut mekanisme tersebut sebagai hukum alam yang akan mendorong manusia untuk masuk ke dalam masyarakat politik. Manusia dalam pandangan Hobbes membentuk kontrak akibat situasi ketegangan dan perasaan ketakutan akan kematian, kontrak seperti ini merupakan kontrak negatif politik sehingga yang dihasilkan akan menjadi masyarakat politik negatif, dimana perasaan pemahaman terjadi sebatas rasa ketakutan. Sementara perempuan dengan membawa *ethics of care* memunculkan rasa pemahaman bukan atas ketegangan maupun ketakutan namun perasaan menghargai perbedaan bahkan tubuh perempuan memiliki suatu kekhasan, yaitu mentolerir pertumbuhan makhluk lain dan tubuh lain dalam dirinya tanpa menjadi penyakit, tanpa penolakan ataupun kematian salah satu organisme hidup menghargai.

Selain itu, bagi Hobbes manusia mempunyai hak alamiah untuk mencari apa saja yang dapat memuaskan keinginannya. Tiap-tiap orang bertindak untuk menyelamatkan apa saja yang dianggapnya sebagai kebaikan tertinggi dan

menghindari bahaya yang ada pada waktu ia bertindak, sehingga manusia mampu mengatasi ketakutan akan kematian dan menikmati kehidupan yang menyenangkan. Kelemahan pemikiran ini adalah menolak setiap uji transendental tentang kebaikan dan keburukan. Objek apapun yang diinginkan adalah baik dan yang dibenci adalah buruk. Ukuran kebaikan dan keburukan adalah murni suyektif, karena perkataan baik, jahat dan tercela selalu digunakan dalam kaitannya dengan orang yang menggunakannya. Sementara itu tidak ada pedoman umum tentang yang baik dan buruk, yang berasal dari sifat obyek-obyek itu sendiri. Persoalan tersebut turut menyumbang karakterisasi patriarkal dimana berusaha meraih kekuasaan tertinggi sebagai kebaikan tertinggi, hal ini merupakan watak konstituif patriarkal, yakni berusaha menyebarkan identitas kekuasaan terhadap objek-objek lain sehingga dapat menjadi identitas dominan.

Perdamaian rumusan "Hobbes" merupakan perdamaian untuk mencari rasa aman dan pencarian laba bagi individu (terutama patriarkal). Dengan demikian, perdamaian dilakukan bukan karena rasa menghargai perbedaan dan memang seharusnya terjadi, melainkan sebagai instrumen pendukung dalam meraih kepentingan kebaikan tertinggi personal. *Ethics of care* yang dibawa dengan gaya khas oleh perempuan dapat menghasilkan perdamaian yang tidak hanya mengejar keuntungan pribadi namun murni perdamaian bagi individu-individu lain tanpa ada intensitas kepentingan tertentu di dalamnya. Sehingga, politik perempuan pun tidak hanya mengejar tujuan bagi perempuan semata namun bagi *other people*, *women politics for other people*, seperti ekofeminis yang memiliki gol terhadap *nature* dan kepedulian terhadap individu lain baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Politik perempuan tidak mendahulukan kepentingan pribadi namun kepentingan bersama bagi bersama, terdapat muatan altruisme dalam karakter politik perempuan.

Selain dikarenakan alasan utamanya untuk menghancurkan kelanggengan budaya patriarkal terdapat faktor-faktor yang membuat perempuan menjadi sangat penting untuk terlibat di dalam politik, faktor tersebut adalah:³¹

³¹ Soenja Boezak, *Redefining Politics: South Africa Women and Democracy*, hal. 13-14

- 1) Sebuah pemerintahan oleh laki-laki untuk laki-laki tidak dapat mengklaim dirinya menjadi sebuah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.

Politik demokrasi dapat menuju telos keadilan jika melibatkan laki-laki dan perempuan secara adil di dalam proses kerjanya. Bagaimana mungkin suatu pemerintahan bisa mengklaim dirinya telah demokratis jika dalam pelaksanaannya hanya meminggirkan keberadaan perempuan? Politik demokrasi tidak hanya untuk laki-laki tapi untuk rakyat (dimana perempuan termasuk di dalamnya).

- 2) Perempuan pada dasarnya adalah pelaku politik yang lebih bisa memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik, selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu dan persoalan-persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik laki-laki.

*Women's participation in politics is not a luxury, but a necessity,*³² inilah yang dikatakan oleh Florence Butegwa. Persoalan kebutuhan maupun ketubuhan perempuan lebih akurat jika disuarkan oleh diri perempuan itu sendiri karena perempuanlah yang dapat berbicara “sebagai perempuan” dan bukan berbicara “seperti perempuan”. Perempuan harus berbicara sebagai subjek bagi dirinya dan mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan yang selama ini tidak terlalu dimengerti oleh laki-laki, seperti isu: penjualan perempuan dan anak; pendidikan perempuan, TKW, aborsi, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masih banyak lagi.

- 3) Perempuan membawa gaya dan nilai politik yang berbeda.

Perempuan memiliki kemampuan dan gaya pengambilan keputusan yang berbeda, Virginia Wills menyebutnya sebagai “nilai-nilai perempuan yang istimewa” yang merupakan hasil dari sosialisasi keluarga dan masyarakat secara umum terhadap perempuan sejak mereka kecil hingga dewasa.³³

Ciri budaya politik perempuan yang membuat mereka memiliki

³² *Ibid.*, hal. 14-15

³³ Virginia Wills, *Public Life: Women Make a Difference*, hal. 10.

kemampuan pengambilan keputusan dengan gaya berbeda dilatarbelakangi oleh:

- ❖ "Pengalaman perempuan", *women as women* dan *women as mother*, posisi *women as mother* membuat mereka memiliki *ethics of care* yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini yang membuat perempuan bekerja bahkan berusaha mencurahkan segala energi yang diluapkan dalam rasa kepedulian terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan dan anak-anak; orang manula; cacat; kelompok minoritas dan kelompok tertindas lainnya. Hal ini pula yang membuat para caleg perempuan membawa isu-isu sekitar: pendidikan perempuan dan anak; kesehatan perempuan dan anak; kesejahteraan serta lingkungan.
- ❖ Perempuan di parlemen umumnya lebih bersifat realistis dan praktis dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka mampu menerima saran, kritik, melakukan inisiatif dan bersedia bekerja bersama-sama. Perempuan juga dalam pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati serta memperkirakan dampak baik buruknya keputusan tersebut bagi orang lain
- ❖ Perempuan memiliki kemampuan komunikatif yang aktif, perempuan dalam perannya sebagai ibu telah melakukan komunikasi intensif kepada sang anak baik ketika sang anak berada dalam kandungan maupun setelah sang anak lahir. Kemampuan komunikasi yang lebih terbuka ini membuat perempuan lebih cepat berkomunikasi dengan individu lain. Seperti Arendt katakan bahwa komunikasi merupakan salah satu instrumen politik dan ini dimiliki oleh perempuan dengan level yang lebih tinggi daripada laki-laki.
- ❖ Perempuan memiliki *ethics of care* yang sangat mencintai damai *peacefull*, perempuan memiliki karakter yang anti perang dan mencintai suasana damai, hal ini pula yang sangat menguntungkan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dilakukan oleh perempuan. Ketika mengambil keputusan perempuan tidak hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya namun juga bagi pihak yang lain

terutama pihak yang tertindas, berdasarkan survey terlihat bahwa perempuan lebih memiliki kuantitas jiwa penolong yang lebih besar dari pada laki-laki.

- ❖ Pemerintahan selalu dipenuhi dengan *money politics* maupun korupsi, namun kembali berdasarkan survey menunjukkan bahwa perempuan yang berada di dalam pemerintahan memiliki kinerja yang bersih dan anti korupsi. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang memiliki tingkat korupsi tertinggi.

Tanpa partisipasi aktif perempuan dan memasukkan perspektif perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan kebijakan, maka tujuan dari kesetaraan, pembangunan dan perdamaian tidak akan tercapai. Salah satu usaha yang dilakukan Indonesia agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan adalah melalui *affirmative action*, kuota 30% sebuah nominal yang masih kecil namun ini dapat dijadikan langkah awal agar perempuan dapat terangsang duduk dalam pemerintahan. Indonesia sendiri termasuk negara yang ketinggalan dalam *affirmative action*, hal ini dapat dilihat dengan membandingkan dengan Negara-negara lain yang jauh lebih dulu menerapkannya dengan presentase yang jauh lebih besar dan menguntungkan perempuan, berikut tabel *affirmative action* yang merepresentasikan kemajuan perempuan dalam negara-negara tersebut:

Tabel 5.1
Negara-negara Affirmative Action

NO	NEGARA	AFFIRMATIVE ACTION
1	Perancis	Terdapat <i>Party Law</i> (UU Partai Politik) pada tahun 1999. <i>Party Law</i> mensyaratkan setiap partai politik menyertakan perempuan sebanyak 50%.
2	Argentina	Kuota Perempuan diwajibkan, <i>Ley de cupos</i> yang diundang-undangkan pada tahun 1991 mengatur

		setiap parpol untuk memenuhi 30% caleg dalam posisi jadi. Bagi parpol yang gagal memenuhinya akan ditolak untuk mengikuti Pemilu.
3	Belgia	<i>Electoral Act</i> yang diundang-undangkan pada Mei 1994 membatasi setiap parpol untuk tidak mengajukan caleg yang berjenis kelamin sama lebih dari 2/3 bagian. Parpol yang tidak melaksanakan UU ini daftar calegnya harus dibiarkan kosong atau dianggap tidak sah.
4	Swedia	Pada tahun 1994 menetapkan <i>Zipper Principle</i> , dalam penetapan caleg susunannya harus dibuat secara selang-seling. Jika perempuan ada di nomor 1, maka nomor duanya adalah laki-laki. Jika nomor 1 adalah laki-laki, maka nomor 2 adalah perempuan dan seterusnya
5	Rwanda	<i>Affirmative action</i> sebanyak 48%

Jika melihat Negara-negara di atas memang Indonesia telah kalah *start* tetapi bukan berarti perempuan Indonesia tidak bisa mencapai pemerintahan seperti yang terjadi di negara-negara tersebut. Kuota 30 % dapat dijadikan langkah awal namun rintangan yang dihadapi masih sangat banyak, terutama persoalan pendidikan politik perempuan Indonesia. Ada raut kerut yang banyak ketika membicarakan politik kepada masyarakat Indonesia karena selama ini politik telah telah terlanjur dianggap sebagai sesuatu yang kotor, busuk dan sedapat mungkin jika dapat dihindari maka akan mereka hindari. Padahal politik tidak dapat kita hindari karena politik adalah keseharian kehidupan kita (baik kita sadari maupun tidak), pendidikan politik sangat penting agar semua pihak dapat memahami politik secara matang terutama perempuan.

Perempuan harus terjun ke ruang publik dan turut berpartisipasi dalam politik agar dapat merealisasikan apa yang seharusnya menjadi hak mereka sekaligus mereka dapat menemukan identitas mereka kembali. Selama ini ada

keterlupaannya bahwa perempuan juga memiliki Hak Azasi (hak-hak perempuan sering terabaikan dalam masyarakat), solusi awal dalam memecahkan persoalan ini adalah mau tidak mau perempuan harus masuk dalam politik karena dengan kekuasaan politiklah maka mereka dapat memiliki ruang keluasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan dan menjadikan perempuan Indonesia lebih matang dan mandiri (seperti yang telah dilakukan oleh Swedia). Akan tetapi, agar perempuan bisa berpartisipasi dalam politik khususnya dalam parlemen, maka diperlukan pendekatan terhadap instrumen vokal yang dapat memudahkan langkah perempuan, instrumen tersebut adalah:

- ❖ Partai Politik, partai politik merupakan alat yang sangat penting dalam politik demokrasi karena melalui partai politik lah akan disalurkan kandidat-kandidat (caleg) yang akan menempati kursi di parlemen dan nantinya akan menyuarakan aspirasi rakyatnya. Partai politik turut mempengaruhi kedudukan perempuan dalam parlemen karena merekalah yang akan membuka peluang serta menentaskan perempuan dalam parlemen. Akan tetapi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini perempuan masih dijadikan boneka politik dalam ajang Pemilu, partai politik sengaja meletakkan perempuan sebagai caleg partainya agar masyarakat simpati dan memiliki pandangan bahwa partai politik tersebut memiliki agenda yang ramah terhadap perempuan. Fakta terselubung yang terjadi menunjukkan bahwa perempuan yang terpilih oleh partai politik tertentu akan ditukar kursinya oleh laki-laki dalam parlemen, hal ini jelas-jelas telah menipu masyarakat. Selain itu masih ada kasus masyarakat yang memilih caleg perempuan hanya melihat dari kecantikan perempuan itu, jika ia sangat cantik maka akan "dicontreng" namun jika tidak menarik maka akan dicari caleg lain sebagai pilihan, hal ini menunjukkan minimnya pendidikan politik pemilih. Perempuan jelas bukan boneka politik namun dalam pelaksanaannya perempuan masih dijadikan alat dan boneka oleh partai-partai politik. Selain itu yang menjadi kendala lain adalah persoalan nomor urut, partai-partai sudah terlanjur mengatakan kepada masyarakat hanya untuk mencontreng tanda gambar dan orang yang berarti peluang besar hanya pada urutan nomor pertama dan kedua, dimana sedikit

sekali perempuan yang dinominasikan di urutan tersebut. Partai politik seharusnya memiliki persyaratan caleg internal dalam partainya dengan prinsip kesetaraan gender yang harus transparan, partai politik juga harus menerapkan sistem keadilan gender dalam susunan anggota partainya sehingga perempuan juga bisa menempati posisi kuat dalam partai politik (tidak hanya menjadi pemanis), selain itu harus adanya strategi penomoran caleg yang dilakukan dengan selang-seling, dalam arti jika nomor satu laki-laki maka nomor duanya perempuan, begitu juga sebaliknya jika nomor satu perempuan maka nomor duanya laki-laki, sehingga tidak akan merugikan caleg-caleg perempuan yang biasanya mendapat nomor urut rendah.

- ❖ Pemerintah Birokrasi, pemerintah memiliki posisi yang kuat karena merupakan pembuat kebijakan dan keputusan, oleh karena itu akan memudahkan bagi perempuan jika pemerintah memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan perspektif keadilan gender sehingga dapat menguntungkan perempuan. Kuota 30 % pun dapat dinaikkan menjadi 50% seperti yang telah dilakukan oleh Negara Perancis, hal ini tidak hanya menguntungkan bagi perempuan namun juga dapat menciptakan keadilan gender. Pemerintah juga dapat menetapkan peraturan Pemilu dimana memungkinkan adanya calon kandidat independen sehingga perempuan dapat memajukan dirinya sebagai caleg tanpa harus bergabung dengan partai politik. Selain itu, campur tangan pemerintah dapat membuat "politik cermin biseksual, *mirror bisexual politics* terealisasi karena dapat dimasukkan dalam bentuk konstitusi, hal ini dapat dijadikan salah satu cara dalam menodorong pendidikan politik masyarakat karena masyarakat dapat memahami interrelasi yang terjadi dalam politik dan mereka dapat memahami posisi subjek lain.
- ❖ Parlemen, Jodi Lovenduski dan Azza Karam menyatakan sedikitnya ada empat bidang perubahan yang harus dilakukan dalam parlemen yang akan berdampak pada partisipasi perempuan, yakni :

- a. Institutional / Prosedural: Membuat parlemen lebih “ramah perempuan” melalui langkah-langkah yang memajukan kepedulian gender yang lebih besar.
 - b. Representasi: Menjamin keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong kandidat-kandidat perempuan, serta mengajukan legislasi kesetaraan gender.
 - c. Dampak / Pengaruh terhadap Keluaran (*Output*) : ”Feminisasi” legislasi dengan memastikan bahwa ia sudah memperhitungkan keprihatinan perempuan.
 - d. Diskursus: Mengubah bahasa parlementer sehingga perspektif perempuan menjadi suatu hal yang wajar.
- ❖ Masyarakat dan Perempuan. Masyarakat merupakan subjek pemilih utama yang menentukan caleg yang akan terpilih, sangat riskan jika masyarakat sendiri tidak tahu siapa yang dipilihnya atau seperti apa sebenarnya karakter caleg yang dipilih. Masyarakat sangat memerlukan pendidikan politik karena ini yang akan menentukan pilihan yang akan mereka ambil, jika pendidikan politik mereka minim maka mereka akan mudah terbawa rayuan para caleg parpol yang mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan arah orientasi mereka. Pendidikan politik yang ditawarkan juga harus memiliki perspektif gender yang adil bahkan perspektif perempuan dapat turut dimasukkan ke dalamnya sehingga mereka dapat memahami bagaimana sulitnya posisi perempuan dalam politik. Pendidikan politik ini harus disampaikan dengan gencar, intensif dan menggunakan bahasa yang ”merakyat”. Media disini memiliki peran yang cukup besar dalam membangun hal tersebut karena selama ini masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya dengan televisi, radio atau surat kabar. Perspektif perempuan harus dikedepankan, hal ini dapat mendorong masyarakat untuk memilih caleg perempuan dan mendukung partai politik yang membawa isu-isu perempuan.

Jika perempuan telah masuk dalam kursi parlemen maka hal ini akan memudahkan mereka untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat

memajukan dan membuat mandiri perempuan Indonesia, kebijakan tersebut dapat masuk dalam segala aspek seperti: ekonomi (contoh: upah buruh perempuan harus disesuaikan dengan UMR serta jam kerja mereka dan mereka harus mendapatkan perlakuan yang adil selama bekerja); kesehatan (contoh: adanya tunjangan uang terhadap perempuan di mulai saat mereka mengandung sampai melahirkan); politik (contoh: membuat pemerintahan memiliki cara pandang perspektif perempuan sehingga pihak-pihak yang berada di dalam pemerintahan dapat lebih adil dalam memandang perempuan); pendidikan (contoh: meningkatkan pendidikan perempuan di Indonesia, menekan jumlah buta huruf serta memberikan jurnal buletin perempuan sehingga mereka dapat memahami posisi dan identitas mereka); hukum (contoh: mengancam keras perbuatan kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan sanksi yang besar, mengeluarkan UU anti nikah sirih dan perselingkuhan sehingga posisi perempuan menjadi kuat dan tidak lagi tertindas) dan masih banyak bidang lainnya.

Ada anggapan bahwa dalam demokrasi selalu menyertakan dua kubu, yakni mayoritas (ditempati oleh laki-laki) dan minoritas (ditempati oleh perempuan). Terdapat dua pilihan yang ditawarkan kepada pihak minoritas, yakni mengikuti apa kata mayoritas atau keluar dari sistem (yang berarti keluar dari negara Indonesia dan pindah ke negara yang memiliki perspektif perempuan seperti: Swedia), namun ada satu pilihan lain yang terlupakan disini dan itu yang menjadi pilihan saya, yakni merubahnya. Jika saya tidak suka dengan sistem politik yang sangat meminggirkan perempuan maka saya tidak akan berdiam diri menerima hal tersebut atau keluar dari negara dan mencari negara yang sesuai dengan keinginan saya, namun saya akan merubah sistem politik tersebut dan ini pula yang harus dilakukan oleh perempuan lain. Sebuah perubahan yang kuat sangat diperlukan untuk merubah sistem politik yang kancang dengan budaya patriarkal. Perempuan harus menjadi subjek perubahan tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi pihak lain, menempati posisi subjek lebih sekedar persoalan pengucapan namun juga harus berakar pada praktik sosial dimana perempuan harus terlibat langsung dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik, dan jika mereka tidak suka maka mereka harus merubahnya.